DOKUMEN
RENCANA KERJA
KECAMATAN LUMBIS



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Kecamatan Lumbis Tahun 2026. Renja Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.

Renja Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Tahun 2026 memuat Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2026. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarbesarnya.

Lumbis, 09 Juli 2025

Camat Lumbis

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN LUMBIS

Drs.Rusmansyah
Pembina TK.I IV/b
Nip.19671201 200701 1 019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Lumbis secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Lumbis membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:

   (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
   (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

(c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan

(d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah
tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumbis Pansiangan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Kecamatan Lumbis Tahun 2026 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Lumbis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor Tahun

2020 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lumbis 2026 adalah

1. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945
2. Landasan Pancasila
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Utara Tahun 2016-2021);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
31. Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan untuk

periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. **Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Renja Kecamatan Lumbis Tahun 2027 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Lumbis Tahun 2025 Dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Lumbis Tahun 2026 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2026.

Pada Tahun 2026 OPD Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp 5.503.930.535,-dan terealisasi sebesar Rp 4.849.596.902,- (88,11%) dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanan Perangat Daerah sebesar Rp 9.750.000 atau 99,89 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 9.760.000

   b) Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD Sebesar Rp. 9.960.000.- Atau 94,31 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 10.560.000

   c) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sebesar Rp. 2.490.000.-Atau

   100,00 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.490.000

   d) Kegiatan Penyediaan Gaji Tunjangan ASN Sebesar Rp. 3.926.795.660.-Atau 90,37 % dari target yang direncanakan sebesar Rp 4.345.121.575.-

   e) Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triulan/Semester SKPD Sebesar Rp. 32.500.000.- Atau 99,75 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 32.580.000.-

   f) Kegiatan Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor Sebesar Rp. 212.255.310.- Atau 90,66 % dari Target yang direncanakan sebesar Rp. 234.120.000.-

   g) Kegiatan Penyediaan bahan logistik Sebesar Rp. 34.518.090.- Atau 99,73 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 34.610.830.-

   h) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Sebesar Rp. 6.999.850.- atau 100,00 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 6.999.850.-

i) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 188.344.760.- Atau 99.98% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 188.371.000.-

j) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sebesar Rp. 212.255.310- Atau 90,06 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 234.120.000 .-

k) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik Sebesar Rp. 28.474.262.- Atau 67,79% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.-

l) Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Sebesar Rp. 285.488.000.- Atau 67,79 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 421.085.000.-

m) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Sebesar Rp. 19.363.500.- Atau 93,56 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 20.696.000.-

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Sebesar Rp. 165.171.380,.- Atau 83,03 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 198.910.880,.-

b) Koordinasi Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait Sebesar Rp. 165.171.380.- Atau 83,03 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 198.910.880.-

c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan Sebesar Rp. 0 Atau 0 % Dari Target yang direncanakan sebesar Rp. 0

d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan Yang Terkait Dengan Kewenanan Lain Yang Di limpahkan Sebesar Rp.0 Atau 0% Dari target yang direncanakan sebesar Rp 0

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa Sebesar Rp. Atau % Dari target yang direncanakan sebesar Rp 0

b) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan Sebesar Rp.0 Atau 0 % Dari target yang direncanakan sebesar Rp.0

4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

a) Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikel di wilayah kecamatan Sebesar Rp.40.416.000 Atau48.92 % Dari target yang direncanakan sebesar Rp 82.616.000
b) Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegagkan peraturan perundangan undangan dan/atau kepolisian negara republic Indonesia Sebesar Rp. Atau % Dari target yang direncanakan sebesar Rp 0

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 30.390.500.- Atau 95,22 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 31.915.500.-
b) Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 7.320.500.- Atau 100% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 7.320.500.-
c) Fasilitasi Penyelengaraan Ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Sebesar Rp. 13.310.000.- Atau 100,00% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 13.310.000.-
d) Fasiltasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat desa Sebesar Rp. 9.760.000.- Atau 86,48 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 11.285.000.-
e) Koordinasi pendampingan di Desa Sebesar Rp.0.- Atau 0% dari target yang direncanakan sebesar Rp.0.-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Lumbis

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Lumbis

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Pemerintahan Kecamatan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Mengefektifikan jalur-jalur koordinasi dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban.
5. Peningkatan kesejahteraan sosial dengan jalan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan dan masalah-masalah sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2026 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Lumbis Tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD Kecamatan Lumbis 2025 – 2029 merupakan program dan kegiatan yan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD dan Pagu Kewilayahan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Lumbis tahun 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan antara lain Musrenbang tingkat Desa serta Musrenbang Tingkat Kecamatan, dari proses tersebut disepakati berbagai program dan kegiatan yang lebih diarahkan pada:

1. Pembangunan dan peningkatan bidang prasarana pengembangan wilayah yang meliputi : pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan normalisasi sungai.
2. Peningkatan bidang ekonomi yang meliputi : sektor lingkungan hidup, sektor kehutanan, sektor pertanian, perikanan tanaman pangan dan peternakan, sektor perindustrian, perdagangan dan UMKM, serta sektor pariwisata gerbang satria..

3. Pembangunan dan peningkatan bidang sosial budaya yang meliputi : sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, sektor pendidikan, sektor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, sektor kesehatan dan sektor perpustakaan dan arsip daerah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bentuk aspirasi langsung yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif maupun legislatif sehingga pembangunan disetiap desa di wilayah Kecamatan Lumbis dapat adil dan merata.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Selain itu, kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu, agar pencapaian sesuai dengan rencana, misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance.* Oleh karena itu, kebijakan yang digariskan untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten nunukan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah :

1. Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur kecamatan, serta mendorong penyelesaian perselisihan sengketa tanah secara kekeluargaan dan jalur mediasi, guna meningkatkan kualitas pemerintahan kecamatan.
2. Melakukan pendataan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar tersedia sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Mengefektifkan koordinasi dalam mengatasi gangguan keamanan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan integrasi kebijakan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah kemiskinan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lumbis

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Nunukan, maka tujuan Renja Kecamatan Lumbis adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan, keamanan dan ketertiban, masyarakat yang sejahtera, dan optimalisasi penggalian

sumber-sumber PAD kecamatan. Sedangkan sasaran Renja adalah meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan, tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya PAD kecamatan.

3.3 Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

b. Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik;

c. Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahaan Umum

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan Perencanaan,Pengangaran dan Evaluasi Perangat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Penyelengaraan Pemerintahan Dan Pelayan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
2. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

c. Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahaan Umum

1. Kegiatan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Dearah
2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada prinsipnya program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya Kecamatan Lumbis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Lumbis yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang-undang Nomor ..... Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lumbis. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Lumbis ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga rencana kerja (Renja) Kecamatan Lumbis tahun 2026 dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Lumbis, 09 Juli 2025

Camat Lumbis

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN LUMBIS

Drs.Rusmansyah
Pembina TK.I IV/b
Nip.19671201 200701 1 019

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEC. LUMBIS KAB. NUNUKAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KEC. LUMBIS						**5.738.050.535,00**							**4.912.006.280,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.738.050.535,00**							**4.912.006.280,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.738.050.535,00**							**4.912.006.280,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.275.741.155,00**							**4.721.904.080,00**	
		Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD						**5.275.741.155,00**							**4.721.904.080,00**	
			999.Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	100 %		100 %	100 %	**5.275.741.155,00**						100 %	**4.721.904.080,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan						22.810.000,00					OPD Kecama		43.810.000,00	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												tan		25.950.000,00	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel						22.810.000,00						OPD Kecamatan		25.950.000,00	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.977.760,00							12 Dokumen	25.950.000,00	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.977.760,00							2 Laporan	25.950.000,00	
	7.01.01.2.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.180.000,00								5.360.000,00	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.180.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6 Dokumen	5.360.000,00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja						8.377.680,00								5.360.000,00	

						SKPD													
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.377.680,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6 Laporan	5.360.000,00	KEC. LUMBIS
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel						2.018.063.177,00					-		5.360.000,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.018.063.177,00						20 Orang/bulan	4.010.991.480,00	
	7.01.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.400.133.984,00							4.010.991.480,00	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/14 bulan		35 Orang/14 bulan	55/14 Orang/bulan	4.400.133.984,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		42 Orang/bulan	4.010.991.480,00	KEC. LUMBIS

	7.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.071.280,00					OPD Kecamatan dan ASN		109.998.600,00	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah											OPD Kecamatan dan ASN		109.998.600,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	145.342.000,00						12 Laporan	69.996.000,00	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	30.410.300,00						8 Paket	32.863.600,,00	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.564.900,00							00	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto												36.000.000,00	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	234.120.000,00						5 Paket	36.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						234.120.000,00							36.000.000,00	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Paket	36.000.000,00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.117.380,00							32.863.600,00	

						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	5.117.380,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Paket	32.863.600,00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.923.900,00								
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	1.923.900,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						145.342.000,00							69.996.000,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	145.342.000,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	69.996.000,00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0					OPD Kecamatan		12.060.000,00	

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0					OPD Kecamatan		12.060.000,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0						12 Laporan	12.060.000,00	
	7.01.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00							32.000.000,,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan Laporan	42.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Laporan	32.000.000,,00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.104.000,00					OPD Kecamatan		208.860.000,00	
						Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						31.104.000,00					OPD Kecamatan		208.860.000,00	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	141.206.000,00						3 Unit	102.410.000,00	

	7.01.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau						20.696.000,00							102.410.000,00	
						Kendaraan Dinas Jabatan														
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	1 Unit	20.696.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 Unit	102.410.00000	KEC. LUMBIS
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel											OPD Kecamatan		30.000.000,00	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-							-	0	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-							-	0	

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-							-	0	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-							-	0	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-							-	00	
	7.01.01.2.01.0002					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													0	
						Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-		Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.01.0003					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													0	

						Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-			Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0	KEC. LUMBIS
														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.01.0004					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0	
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.01.0005					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													0	

						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-			Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0	KEC. LUMBIS
														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.977.000,00						25.950.000,00	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	4.977.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	25.950.000,00	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											-		4.037.001.48000	

						Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel											-		4.037.001.480 00	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										-	30.000.000, 00	
	7.01.01.2.02. 0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					32.580.000, 00								
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												26.010.000,00	

						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	32.580.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-		KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.980.000,00					OPD Kecamatan		0	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	4.980.000,00						-	0	
	7.01.01.2.03.0005					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.980.000,,00							0	
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	4.980.000,,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0	KEC. LUMBIS

	7.01.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											-		0	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-							-	0	
	7.01.01.2.05.0004					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													0	
						Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-			Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0	KEC. LUMBIS
	7.01.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					,00					OPD dan Kecamatan		36.000.000,00	
						-					0,00					OPD dan Kecamatan	5 Paket	36.000.000,00	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	-		-	-	0,00						-	00	
							Disediakan													
	7.01.01.2.07.0002					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00							00	

						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-		0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	00	KEC. LUMBIS
2.	**7.01.02**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**198.910.880,00**							**43.230.880,00**	
						Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan														
							999.Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	100 %		100 %	100 %	198.910.880,00						100 %	43.230.880	
	7.01.02.2.02					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						198.910.880,00					Masyarakat		34.274.920,00	
						oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														

					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											Masyarakat		34.274.920,00	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.040.000,00						4 Laporan	34.274.920,00	
	7.01.02.2.02.0003				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						188.928.380,00							0	
					Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	13 Laporan	188.928.380,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 Laporan	0	KEC. LUMBIS
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0,00					Masyarakat		0	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													34.274.920,00	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	34.274.920,00	
	7.01.02.2.02.0001					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0,00							8.955.960,000	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-		0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	8.955.960,00	KEC. LUMBIS
	7.01.02.2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0,00					Masyarakat		0,00	
						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0,00					Masyarakat		0,00	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.04.0002					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						0,00							0,00	

						Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-		0,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	0,00	KEC. LUMBIS PANSIANGAN
3.	**7.01.03**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**31.915.500,00**								**29.750.000,00**	
						Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat														***29.750.00000***	
							999.Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	100 %		100 %	100 %	31.915.500,00						100 %	29.750.000,00	
	7.01.03.2.01					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						31.915.500,00					Masyarakat Desa		29.750.000,00	

						Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi						,0 0					Masyara kat Desa		29.750.000,0 0	
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	31.915.500,0 0						11 Laporan	29.750.000,0 0	
	7.01.03.2.01. 0003					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						7.320.500,0 0							5.950.0000 0	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0							5.950.00,000	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0							5.950.000,00	
						Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													5.950.000,	

						Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan		11 Laporan	13 Laporan	7.320.500,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		11 Laporan	5.950.000,00	KEC. LUMBIS
4.	**7.01.04**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**20.775.000,,00**							**21.080.000,00**	
							Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instans	-		-	100 %	20.775.000,,00						-	**21.080.000,00**	
	7.01.04.2.02					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.775.000,00					Masyarakat		21.080.000,00	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	20.775.000, 00						-	4.000.000,00	

	7.01.04.2.02.0001					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						6.655.000,00							9.180.000,00	
						Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	13 Laporan	6.655.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Lumbis Pansiangan || - || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	9.180.000,00	KEC. LUMBIS
						Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						0							5.100.000,00	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan						0							9.180,00	

						Ketahanan Nasional													
	J U M L A H										**7.738.050.535 57,00**							**4.912.006.280 ,00**	